

Implementasi Aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial Next Generation Geographic Information System dalam Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Studi di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur)

Nova Rochmatul Faiza¹, Radjikan², Teguh Santoso³

^{1,2,3} Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

novarochmatul01@gmail.com¹, radjikan@untag-sby.ac.id², teguh@untag-sby.ac.id³

Abstract

The world has progressed quite rapidly, especially in the technology and communication sector. The development of technology and information is useful for making it easier for humans to exchange information, so that the exchange of information becomes faster and more information is conveyed even though it stretches over long distances. The development of technology and communication is also very beneficial for the public sector, especially in Indonesia, the application of technology and communication is often referred to as electronic government or e-Government. The application of e-government is one way for the government to provide excellent service. The implementation of e-government in Indonesia is starting to vary, one of which is to overcome the problem of updating data for the underprivileged that often appears in Indonesia. This can happen because the state apparatus does not understand how e-government works in updating data. The process of updating data by utilizing e-government is by verifying and validating data using the Next Generation Geographic Information System Social Welfare System application. Based on the results of the research conducted, that the implementation of the SIKS-NG GIS application in updating DTKS produces data that is in accordance with the conditions of KPM in the field. It can be concluded that the problem that often arises in the implementation process is that the data in the SIKS-NG GIS application in the form of the NIK of the Beneficiary Family is not in accordance with the data in the field, causing the data to not synergize. Errors when proposing DTKS that caused a lot of data that was not suitable and invalid in the SIKS-NG GIS and DTKS application systems.

Keywords: SIKS-NG GIS application, DTKS, KPM.

Abstrak

Dunia telah mengalami kemajuan yang cukup pesat, khususnya pada sektor teknologi dan komunikasi. Perkembangan teknologi dan informasi berguna untuk memudahkan manusia dalam melakukan pertukaran informasi, sehingga pertukaran informasi menjadi lebih cepat dan semakin banyak informasi yang tersampaikan walaupun terbentang jarak yang jauh. Perkembangan teknologi dan komunikasi juga sangat bermanfaat bagi sektor publik, khususnya di Indonesia, penerapan teknologi dan komunikasi sering disebut dengan elektronik government atau e-Government. Penerapan e-government merupakan salah satu cara pemerintah memberikan pelayanan yang prima. Implementasi e-government di Indonesia mulai beragam, salah satunya untuk mengatasi masalah pembaruan data masyarakat kurang mampu yang sering muncul di Indonesia. Hal tersebut dapat terjadi karena aparatur negara kurang memahami bagaimana cara kerja e-government dalam melakukan pemutakhiran data. Proses pemutakhiran data dengan memanfaatkan e-government yaitu dengan cara melakukan verifikasi dan validasi data menggunakan aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial Next Generation Geographic Information System. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa implementai aplikasi SIKS-NG GIS

dalam pemutakhiran DTKS menghasilkan data yang sesuai dengan kondisi KPM dilapangan. Dapat disimpulkan bahwa masalah yang sering muncul dalam proses implementasi yaitu data yang berada di aplikasi SIKS-NG GIS berupa NIK Keluarga Penerima Manfaat tidak sesuai dengan Data di lapangan sehingga menyebabkan data tersebut tidak bersinergi. Kesalahan saat melakukan pengusulan DTKS yang menyebabkan banyak data yang tidak cocok dan tidak valid dalam sistem aplikasi SIKS-NG GIS dan DTKS.

Kata kunci : Aplikasi SIKS-NG GIS, DTKS. KPM

Pendahuluan

Penerapan e-government merupakan salah satu cara pemerintah memberikan pelayanan yang prima. Implementasi e-government di Indonesia mulai beragam, salah satunya untuk mengatasi masalah pembaruan data masyarakat kurang mampu yang sering muncul di Indonesia. Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dilakukan menggunakan aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial Next Generation Geographic Information System. Proses pemutakhiran data dengan memanfaatkan e-government yaitu dengan cara melakukan verifikasi dan validasi data menggunakan aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial Next Generation Geographic Information System . Proses verifikasi dan validasi data dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial nomor 5 tahun 2006. Pada peraturan tersebut juga diatur tata cara melakukan proses verifikasi dan validasi data yang terdapat pada bab II pasal 2.

Pemutakhiran data merupakan salah satu keharusan untuk memperbarui data agar bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan tepat sasaran serta pemerintah dapat memantau kondisi ekonomi dan sosial. Penelitian yang dilakukan di Kecamatan Gedangan di Kabupaten Sidoarjo. Beberapa kendala juga sering terjadi di Kabupaten Sidoarjo terkait penggunaan aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial Next Generation Geographic Information System. Kurang maksimalnya aplikasi merupakan salah satu kendala yang banyak di temukan saat melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Pada penelitian terdahulu yang berjudul “E-Government dan Pelayanan (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman)” oleh : Joko Tri Nugraha (2018) reformasi birokrasi menggunakan penerapan e-government merupakan salah satu alternatif dalam perbaikan sistem pelayanan publik. Pada penerapan e-government melalui aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial Next Generation Geographic Information System merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan pembaruan data agar bantuan sosial (PKH dan BPNT) dapat lebih tepat sasaran.

Konsep e-government dapat dianalisis menggunakan tiga elemen keberhasilan e-government yaitu elemen *support*, elemen *capacity* dan elemen *value*. Pada elemen *Support* atau dukungan, merupakan hal yang paling penting. Tanpa adanya dukungan dari pejabat publik penerapan digitalisasi tidak akan terjadi, dukungan ini berbentuk inisiatif pembangunan dan pengembangan e-government. Bentuk dukungan yang dapat dilakukan seperti : disepakatinya kerangka e-government sebagai kunci kesuksesan suatu negara untuk mencapai visi misi suatu negara: disosialisasikan konsep e-government secara merata dan konsisten serta menyuluh diseluruh kalangan birokrat secara khusus dan kepada masyarakat secara umum melalui kampanye simpatik. Sedangkan pada elemen *capacity* ini yang diperlukan dalam pembangunana dan pengembangan e- government agar konsep e-government dapat berjalan atau menjadi kenyataan ketersediaan sumber daya. Terdapat tiga sumber daya yang diperlukan untuk mengimplementasikan e-government yaitu : ketersediaan sumber daya finansial atau dana yang cukup untuk mengimplementasikan e-government, ketersediaan insfratruktur teknologi informasi yang memadai, hal tersebut karena indikator keberhasilan e-governmet terdapat pada ketersediaan

infrastruktur teknologi dan informasi yang memadai. ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan memadai yang dibutuhkan untuk mengoperasikan e-government agar sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan. Pada elemen *value* manfaat yang di dapat pemerintah sebagai pemberi layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan e-government. Pada elemen ini menentukan besar tidaknya manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Sehingga perlunya ketelitian dalam pemilihan aplikasi yang menjadi prioritas masyarakat.

Jenis-jenis e-government terdapat tiga jenis yaitu *publish*, *interact*, dan *transact*. Pada jenis *publish* Pada jenis implementasi e-Government ini tidak memerlukan sumber daya yang besar dan beragam karena proyek pada jenis implementasi ini biasanya berskala kecil. Di dalam jenis implementasi *publish* ini yang terjadi merupakan sebuah komunikasi satu arah yang dimana pemerintah memberikan berbagai data yang dapat diakses langsung serta bebas oleh seluruh masyarakat melalui jaringan internet dengan mengunjungi website resmi instansi dan sesuai dengan kebutuhan informasi yang ingin di peroleh. Sedangkan pada jenis *interact* tidak jauh berbeda dengan *publish*, *interact* juga bersifat pasif. Hanya saja pada jenis ini masyarakat diberikan ruang untuk mencari data yang dibutuhkan, serta pemerintah juga memberikan forum diskusi bagi masyarakat dengan unit-unit tertentu untuk kepentingan baik secara langsung (seperti *chatting*, *tele-conference*, *web-TV*, dan lain sebagainya) maupun secara tidak langsung (melalui *email*, *frequent ask questions*, *newsletter*, *mailing list*, dan lain sebagainya). Sedangkan pada jenis *transact* lebih rumit dibandingkan dengan kedua jenis diatas, karena pada jenis ini terdapat pemindahan uang atau transaksi yang dikenakan dalam melakukan pelayanan yang dibutuhkan kepada pemerintah atau mitra penyedia pelayanan.

Serta menggunakan konsep bentuk dari implementasi e-government yaitu G2G (Government to Government) vertical dan horizontal. Yang menggambarkan hubungan pada implementasi aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial Next Generation Geographic Information System dalam melakukan pemutakhiran Data Terpau Kesejahteraan Sosial. Pada bentuk implementasi ini pemerintah menjalin hubungan antara satu pemerintah dengan pemerintah lainnya. Pada model ini dibedakan menjadi dua macam yaitu G to G horizontal dan vertical. G to G Horizontal yaitu relasi yang dijalin antara satu unit pemerintah dengan unit pemerintah lainnya namun masih dalam satu tingkatan. G to G yang bersifat vertical yaitu relasi yang terjalin lintas instansi seperti pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian kualitatif karena metode pengolahan data dengan cara menganalisis suatu peristiwa yaitu implementasi aplikasi SIKG-NG GIS dalam pemutahiran data DTKS di Kabupaten Sidoarjo. Fokus penelitian dalam skripsi ini merupakan dampak yang diberikan aplikasi SIKS-NG GIS dalam melakukan pemutahiran data DTKS di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Karena pada Kecamatan Gedangan peneliti menemukan beberapa masalah terkait dengan pemutahiran data khususnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, penerima bantuan sosial berupa PKH dan BPNT seperti ketidakcocokan DTKS dengan data dilapangan. Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sumber data primer yang dilakukan secara langsung dengan melakukan wawancara oleh penulis dan data sekunder berasal dari DTKS Pusdatin Kementerian Sosial. Serta teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan teknik wawancara dengan narasumber Koordinator Kabupaten, Koordinator Kecamatan, dan Pejuang Muda selaku agen sosialisasi aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial Next Generation Geographic Information System. Serta Teknik observasi yang dilakukan peneliti dalam implementasi aplikasi di Kecamatan Gedangan Sidoarjo, Teknik dokumentasi juga merupakan Teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian ini. Teknik analisi data yaitu pengumpulan

data pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber penelitian Koordinator Kabupaten Sidoarjo dan Koordinator serta Pejuang Muda yang ditempatkan di Kecamatan Gedangan dengan menggunakan metode implementasi e-Government sebagai landasan teori untuk menganalisa hasil penelitian. Reduksi data pengolahan hasil wawancara yang didapat serta menganalisis hasil perubahan data yang dilakukan selama penggunaan aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial Next Generation Geographic Information System di Kecamatan Gedangan Sidoarjo. Penyajian data yaitu menyajikan data hasil dari wawancara, observasi dan observasi. Analisa dan Penarikan Kesimpulan dilakukan pada tahap akhir penelitian. Analisis dan penarikan kesimpulan dilakukan untuk memahami makna dari data-data yang telah dikumpulkan sehingga dapat diperoleh hubungan dari data-data tersebut. Sehingga dapat dikatakan sebagai jawaban atas suatu permasalahan yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan e-government pada Implementasi aplikasi SIKS-NG GIS di Kecamatan Gedangan Sidoarjo dapat dilihat dari beberapa elemen sebagai berikut: Elemen Support atau dukungan, merupakan hal yang paling penting. Tanpa adanya dukungan dari pejabat publik penerapan digitalisasi tidak akan terjadi, dukungan ini berbentuk inisiatif pembangunan dan pengembangan e-government. Bentuk elemen support disepakatinya kerangka dan sosialisasi konsep e-government atau political will. Pada proses implementasi aplikasi SIKS-NG GIS untuk melakukan pemutakhiran DTKS perlu adanya dorongan dari pemerintah pusat atau Kementerian Sosial. Elemen Capacity Pada elemen capacity ini yang diperlukan dalam pembangunana dan pengembangan e- government agar konsep e-government dapat berjalan atau menjadi kenyataan ketersediaan sumber daya. Seperti sumber daya finansial, infrastruktur, sumber daya manusia, namun pada penerapan aplikasi SIKS-NG GIS dalam pemutakhiran DTKS di Kecamatan Gedangan Sidoarjo sedikit menemukan kendala. Elemen Value berdasarkan elemen value atau manfaat yang di dapat pemerintah sebagai pemberi layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan e-government. Pada elemen ini menentukan besar tidaknya manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Sehingga perlunya ketelitian dalam pemilihan aplikasi yang menjadi prioritas masyarakat. Pada implementasi aplikasi SIKS-NG GIS dalam pemutakhiran DTKS di Kecamatan Gedangan Sidoarjo yaitu bersinerginya manfaat yang diterima oleh pemerintah dan masyarakat.

Jenis Implementasi E-Government terdapat tiga kelas berbeda yaitu : Publish tahap awal, tidak membutuhkan banyak sumber daya manusia serta satu arah. Interact pada tahap ini tidak jauh berbeda karena hanya menyediakan forum informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Transact pada tahap ini terjadi proses transaksi dalam melakukan pelayanan. Pada ke tiga jenis implementasi tersebut terdapat perbedaan pada penerapan e-government. Sehingga pada penerapan aplikasi SIKS-NG GIS dalam pemutakhiran DTKS di Kecamatan Gedangan termasuk kedalam jenis publish karena hanya dapat diakses oleh petugas yang berwenang.

Model e-government pada implementasi aplikasi SIKS-NG GIS di Kecamatan Gedangan adalah G2G vertical dan horizontal. vertical karena adanya pertanggungjawaban atas penggunaan aplikasi dari Koordinator Kecamatan Gedangan dengan Koordinator Kabupaten. Serta G2G horizontal karena pemutakhiran data dilakukan dengan melakukan sinergi dengan Dinas Pendidikan terkait dengan Dapodik, serta dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk pencocokan NIK.

Perubahan terhadap data DTKS di Kecamatan Gedangan Sidoarjo pada tahun 2021 mencapai 2.193 KPM penerima BPNT dan PKH sedangkan pada tahun 2022 data DTKS berubah menjadi 1.428 KPM terdapat selisih sebanyak 765 KPM. Data tersebut menunjukkan bahwa

penggunaan aplikasi SIKS-NG GIS di Kecamatan Gedangan cukup efektif dalam melakukan penyaringan atau penyeleksian penerima bantuan sosial, sehingga bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran. Pengurangan jumlah KPM ini terjadi karena cukup banyak KPM yang tidak layak menerima bantuan sosial, dan aplikasi SIKS-NG GIS merupakan aplikasi survei yang dilakukan oleh petugas yang berwenang dengan cara melakukan verifikasi dan validasi DTKS serta melampirkan bukti yang lebih objektif dalam melakukan verifikasi dan validasi DTKS karena melampirkan foto tampak depan KPM. Aplikasi SIKS-NG GIS juga dapat melakukan pencocokan DTKS dengan data lapangan. Yang sering terjadi pada data di lapangan yaitu sering kali muncul NIK ganda yang menyebabkan terjadinya ketidakcocokan data, serta peran aplikasi SIKS-NG GIS yaitu menunjukkan NIK yang valid yang telah terdata pada data DTKS dan mempengaruhi dalam proses pencairan bantuan sosial.

Penutup

Dari proses implementasi aplikasi SIKS-NG GIS di Kecamatan Gedangan, Sidoarjo Jawa Timur masih banyak menemukan kendala. Proses verifikasi dan validasi DTKS menggunakan aplikasi merupakan proses mencocokkan data di lapangan dengan data DTKS, karena data yang berada di lapangan masih banyak yang tidak valid sehingga dapat menghambat proses pendistribusian bantuan sosial. Banyaknya NIK yang tidak valid sehingga mendorong penggunaan aplikasi SIKS-NG GIS terus dilakukan hingga data yang disajikan dapat valid.

Perlu adanya dorongan, pengawasan serta political will oleh pegawai yang berwenang di lapangan dalam melakukan verifikasi dan validasi DTKS menggunakan aplikasi SIKS-NG GIS agar bantuan sosial dapat didistribusikan dan tepat waktu dan tepat sasaran. Peningkatan kualitas aplikasi SIKS-NG GIS perlu karena aplikasi tersebut adalah aplikasi yang bertugas sebagai pemutakhiran DTKS. Selain peningkatan kualitas aplikasi juga perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sehingga tidak menimbulkan sumber daya manusia yang gaptek (gagap teknologi).

Daftar Pustaka

- Electronic Government Konsep Pelayanan Publik Berbasis Internet dan Teknologi Informasi . (2006).
- HUSRI. (2020). EFEKTIVITAS APLIKASI PROGRAM PENDATAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL NEXT GENERATION DI KABUPATEN GOWA.
- Pasolong, H. (2016). Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung: ALFABETA, cv.
- Rahma, D. (2017). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KABUPATEN KUNINGAN. Jurnal Unifikasi.
- Sosial, M. R. (2017). TENTANG PEDOMAN UMUM VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU.
- Yudi Nugroho, K. (2021). Efektivitas Penerapan Aplikasi SISTEM KESEJAHTERAAN SOSIAL NEXT GENERATION Untuk Pengolah Data Kemiskinan di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.
- Sumber internet :
- <https://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/e-government#:~:text=Ruang%20lingkup%20dari%20penggunaan%20E,memperbaiki%20hubungan%20interaksi%20dengan%20masyarakat.>
- <https://pejuangmuda.kemensos.go.id/berita-acara/24/sagis-aplikasi-pendataan-survei>